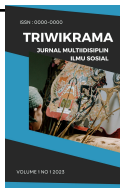
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 6, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



GEOPOLITIK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DI PAPUA: STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA DI PAPUA TAHUN 2025-2026

Princess Ngozi Chika, Silvia Nuraeni[2], Kezia Marlinata Sinaga[3] ,Cindy[4], Jerry Indrawan [5]

[123] Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

A B S T R A K

ARTICLE INFO

Article history:
Received Oktober 2026
Revised Oktober 2026
Accepted Oktober 2026
Available Oktober 2026

2310413034@mahasiswa.upnvj.ac.id

This is an open access article under the CC BYSA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua pada periode 2025–2026, khususnya dalam menghadapi konflik bersenjata yang terjadi di wilayah tersebut. Papua memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berada di kawasan Pasifik, sehingga kondisi keamanannya berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Indonesia. Di sisi lain, konflik bersenjata di Papua juga berkaitan dengan persoalan ketimpangan pembangunan, ketidakadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan pemerintah, dokumen kebijakan, laporan lembaga terkait, jurnal ilmiah, buku, dan pemberitaan media. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori geopolitik dan teori strategi bertahan untuk memahami hubungan antara posisi strategis Papua, kepentingan nasional Indonesia, serta kebijakan pemerintah dalam menghadapi konflik bersenjata. Penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi geopolitik Indonesia diterapkan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempertahankan keutuhan wilayah negara. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan pentingnya keseimbangan antara pendekatan keamanan, pembangunan, dan perlindungan hak masyarakat Papua. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mengenai strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua serta tantangan dalam mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Geopolitik Indonesia, stabilitas keamanan, konflik bersenjata, Papua, strategi bertahan.

A B S T R A C T

This study aims to analyze Indonesia's geopolitical strategy in maintaining security stability in Papua during the 2025-2026 period, particularly in addressing armed conflict in the region. Papua holds a strategic position due to its direct border with Papua New Guinea and its location in the Pacific region, making its security situation closely related to Indonesia's national interests, sovereignty, and territorial integrity. On the other hand, armed conflict in Papua is also associated with issues of development inequality, social injustice, and human

rights protection. This study employs a qualitative approach using descriptive-analytical methods and a case study design. The data consist of secondary sources collected through document analysis, including government reports, policy documents, reports from relevant institutions, academic journals, books, and media coverage. The analysis uses geopolitical theory and defensive strategy theory to examine the relationship between Papua's strategic position, Indonesia's national interests, and government policies in responding to armed conflict. The study focuses on how Indonesia's geopolitical strategy is implemented to maintain security stability while safeguarding the country's territorial integrity. It also considers the importance of balancing security measures, development policies, and the protection of the rights of the Papuan people. The expected outcome of this study is to provide a better understanding of Indonesia's geopolitical strategy in addressing armed conflict in Papua and the challenges involved in achieving sustainable security stability.

Keywords: Indonesian geopolitics, security stability, armed conflict, Papua, defensive strategy.

PENDAHULUAN

Papua merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia, baik dari sisi letak geografis, kedaulatan negara, maupun kepentingan pertahanan dan keamanan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini serta berada di kawasan Pasifik, sehingga dinamika keamanan di Papua tidak hanya berdampak pada masyarakat setempat, tetapi juga pada keutuhan wilayah dan posisi Indonesia di kawasan. Di sisi lain, Papua masih menghadapi konflik bersenjata yang berlangsung cukup lama antara aparat keamanan negara dan kelompok bersenjata. Konflik tersebut menimbulkan korban jiwa, memaksa sejumlah warga mengungsi, serta menghambat pembangunan dan pelayanan publik di beberapa wilayah (ACAPS, 2026; Human Rights Monitor, 2026).

Kondisi keamanan Papua pada periode 2025–2026 menunjukkan adanya eskalasi konflik. Komnas HAM mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata sepanjang tahun 2025 dengan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang mengalami luka-luka. Pada semester pertama 2026, jumlah peristiwa yang tercatat mencapai 42 kejadian dengan 59 korban meninggal dunia dan 50 orang luka-luka (Komnas HAM, 2026). Wilayah yang paling sering menjadi lokasi konflik antara lain Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, dan Nduga. Namun, gejolak keamanan juga dilaporkan terjadi di beberapa daerah lain seperti Maybrat, Teluk Bintuni, dan Boven Digoel (Kompas, 2026). Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan Papua tidak lagi terbatas pada satu wilayah tertentu, melainkan mulai menyebar ke beberapa kabupaten.

Konflik bersenjata di Papua tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan militer. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antardaerah, keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar, persoalan keadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau, kesenjangan pembangunan, dan lemahnya pemerataan pembangunan dapat memperkuat potensi konflik serta menghambat kehadiran negara di wilayah perbatasan (Auliya, 2026). Oleh karena itu, menjaga stabilitas keamanan di Papua memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar operasi keamanan. Negara juga perlu menghadirkan keadilan, memperbaiki pelayanan publik, melindungi warga sipil, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Secara teoretis, penelitian ini menggunakan konsep geopolitik dan strategi bertahan. Geopolitik dipahami sebagai cara negara memahami posisi wilayah, sumber daya, ancaman, dan peluang dalam merumuskan kebijakan nasional. Dalam konteks Indonesia, Papua merupakan bagian penting dari kesatuan wilayah nusantara yang harus dijaga dalam bingkai kedaulatan dan keutuhan negara (Auliya, 2026). Sementara itu, strategi bertahan menekankan bahwa pengelolaan ancaman tidak hanya bergantung pada kekuatan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

militer. Strategi tersebut juga mencakup penguatan ketahanan nasional, pembangunan wilayah, penegakan hukum, diplomasi, serta perlindungan terhadap hak warga negara. Kerangka ini relevan untuk melihat bagaimana pemerintah merespons konflik bersenjata di Papua tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan pembangunan. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konflik di Papua dari berbagai sudut pandang. Wijanarko (2025) menyatakan bahwa penanganan separatisme di Papua membutuhkan kebijakan terpadu yang mencakup bidang politik, pembangunan, keamanan, hukum, hak asasi manusia, dan diplomasi. Penelitian lain menyoroti bahwa konflik Papua masih berlangsung lama dan belum menunjukkan kemajuan yang berarti menuju perdamaian, terutama apabila dibandingkan dengan penyelesaian konflik di wilayah lain melalui jalur perundingan (Taylor dkk., 2026). Sementara itu, Auliya (2026) menekankan pentingnya analisis geopolitik dan geostrategi untuk memahami hubungan antara kondisi geografis, ketimpangan pembangunan, dan dinamika konflik di Papua.

Meskipun kajian mengenai Papua telah cukup berkembang, masih terdapat celah penelitian yang perlu diisi. Pertama, sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada isu separatisme, pelanggaran hak asasi manusia, atau strategi pertahanan secara terpisah. Kedua, kajian yang membahas perkembangan konflik pada periode 2025–2026 masih terbatas, padahal periode tersebut menunjukkan peningkatan kekerasan, perluasan wilayah konflik, dan meningkatnya jumlah pengungsi internal. Ketiga, pendekatan geopolitik sering kali memposisikan Papua hanya sebagai wilayah strategis bagi negara, tetapi belum banyak membahas pentingnya keseimbangan antara keamanan, pembangunan, dan perlindungan hak masyarakat Papua. Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan Papua secara lebih menyeluruh. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis geopolitik dan strategi bertahan dalam membahas konflik bersenjata di Papua pada periode 2025–2026. Penelitian ini tidak hanya melihat Papua dari sisi ancaman terhadap kedaulatan negara, tetapi juga memperhatikan dampak konflik terhadap masyarakat sipil serta pentingnya pendekatan pembangunan dan penegakan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana Indonesia menjaga stabilitas keamanan di Papua tanpa mengabaikan akar persoalan yang melatarbelakangi konflik.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua pada periode 2025–2026, khususnya dalam menghadapi konflik bersenjata. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor yang memengaruhi dinamika konflik, menelaah hubungan antara posisi strategis Papua dan kepentingan nasional Indonesia, serta menilai sejauh mana kebijakan pemerintah telah mampu menyeimbangkan pendekatan keamanan, pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian geopolitik dan studi keamanan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif bagi Papua.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kondisi geografis, kepentingan nasional, dan dinamika konflik yang berlangsung di wilayah tersebut. Papua memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berada di kawasan Pasifik. Kondisi geografisnya yang terdiri

*Princess Ngozi Chika
E-mail addresses: 2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id



atas pegunungan, hutan lebat, serta wilayah yang sulit dijangkau juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengawasan keamanan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menangani konflik Papua perlu dipahami tidak hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek geopolitik, sosial, politik, dan pembangunan.

Konflik bersenjata di Papua merupakan persoalan yang memiliki latar belakang panjang dan berkaitan dengan berbagai faktor. Nursidik (2023) membahas konflik bersenjata di Papua sebagai persoalan yang perlu dipahami melalui konteks historis dan politik wilayah tersebut. Sementara itu, Nurhidayat et al. (2023) dalam penelitian Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia menjelaskan bahwa pendekatan keamanan telah lama menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap konflik Papua. Namun, dominasi pendekatan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Kajian ini menunjukkan bahwa penanganan konflik perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua serta prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Dari perspektif geopolitik, konflik Papua berkaitan erat dengan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial. Kaelan dan Achmad Zubaidi (2010) menjelaskan konsep Wawasan Nusantara sebagai cara pandang yang menempatkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dalam konteks Papua, konsep tersebut dapat digunakan untuk memahami pentingnya menjaga keutuhan wilayah sekaligus memastikan bahwa kebijakan nasional memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, kepentingan mempertahankan wilayah perlu berjalan seiring dengan upaya membangun stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Selain faktor geografis dan kepentingan nasional, strategi pemerintah dalam menghadapi konflik juga dapat dianalisis melalui teori strategi bertahan. Waltz (1979) menjelaskan bahwa negara berupaya mempertahankan keberlangsungan dan keamanannya dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas pusat. Dalam konteks ini, negara dapat memperkuat kapasitas internal untuk menghadapi ancaman serta menjaga integritas wilayahnya. Namun, penguatan kapasitas keamanan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan munculnya dilema keamanan, yaitu ketika tindakan yang dipandang defensif oleh negara justru dianggap mengancam oleh pihak lain. Kondisi tersebut relevan untuk memahami tantangan kebijakan keamanan di Papua, terutama ketika peningkatan kehadiran aparat tidak selalu dipersepsikan secara positif oleh masyarakat.Kajian mengenai konflik Papua juga memperlihatkan bahwa kebijakan keamanan tidak dapat dipisahkan dari persoalan pembangunan dan hubungan antara negara dengan masyarakat. Penelitian Agustus et al. (2025) mengenai strategi Papua Steering Committee menekankan pentingnya menghubungkan upaya menjaga stabilitas dengan percepatan pembangunan dan penanganan akar konflik. Sementara itu, Wangge (2023) menunjukkan bahwa pendekatan sekuritisasi dalam konflik Papua dapat menimbulkan persoalan ketika masyarakat adat tidak memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Kedua kajian tersebut memberikan pemahaman bahwa stabilitas keamanan tidak hanya bergantung pada kemampuan aparat dalam menghadapi kelompok bersenjata, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat, kepercayaan, dan respons pemerintah terhadap persoalan yang mendasari konflik. Dalam konteks periode 2025–2026, dinamika keamanan Papua perlu dikaji dengan memperhatikan perkembangan konflik bersenjata serta kebijakan pemerintah dalam meresponsnya. Pendekatan keamanan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pendekatan sosial merupakan aspek yang perlu dianalisis untuk memahami strategi pemerintah dalam mempertahankan stabilitas. Di sisi lain, perhatian

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



terhadap perlindungan hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan strategi geopolitik tidak cukup diukur dari kemampuan negara mempertahankan penguasaan wilayah, tetapi juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan stabilitas serta dampaknya terhadap masyarakat Papua. Berdasarkan berbagai kajian tersebut, geopolitik dan strategi bertahan menjadi dua perspektif yang relevan untuk menganalisis kebijakan Indonesia di Papua. Perspektif geopolitik membantu menjelaskan arti penting posisi geografis Papua, kepentingan nasional, dan integritas teritorial. Sementara itu, teori strategi bertahan digunakan untuk memahami cara negara merespons ancaman dan mempertahankan stabilitas keamanan. Kedua perspektif tersebut menjadi dasar untuk mengkaji bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan strategi dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua selama periode 2025–2026.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembanding untuk memahami perkembangan kajian mengenai konflik Papua, kebijakan keamanan, dan strategi pemerintah. Beberapa penelitian yang relevan menunjukkan adanya perbedaan fokus, mulai dari pendekatan sekuritisasi, kedaulatan negara, politisasi konflik, pembangunan, hingga dasar hukum operasi militer dan nonmiliter.

Pertama, Wangge (2023) melalui penelitian berjudul Securitization of a Political Conflict in Southeast Asia: Disengaging the Indigenous Audience in West Papua membahas pendekatan sekuritisasi yang digunakan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik Papua. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keamanan dapat menimbulkan dampak negatif ketika masyarakat adat tidak dilibatkan secara memadai dalam proses penanganan konflik. Wangge menekankan pentingnya pendekatan yang lebih deliberatif agar penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada aktor negara. Penelitian ini relevan karena membantu menjelaskan hubungan antara kebijakan keamanan dan keterlibatan masyarakat Papua. Perbedaannya, penelitian Wangge lebih berfokus pada sekuritisasi, sedangkan penelitian ini menempatkan strategi geopolitik Indonesia sebagai fokus utama dengan batasan waktu 2025–2026.

Kedua, Christian (2026) dalam penelitian Totalizing Sovereignty: Securitization and the Paradox of Strong State Power in Papua mengkaji hubungan antara kedaulatan, sekuritisasi, dan penguatankekuasaan negara. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa pendekatan keamanan dan pembangunan yang terlalu terpusat dapat memperdalam persoalan yang ingin diselesaikan apabila tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat lokal. Kajian ini relevan karena menunjukkan bahwa upaya mempertahankan kedaulatan memiliki hubungan dengan legitimasi kebijakan negara dan dinamika regional. Perbedaannya, penelitian Christian lebih menekankan konsep kedaulatan dan kekuasaan negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi dinamika konflik bersenjata selama 2025–2026.

Ketiga, Nurhidayat et al. (2023) melalui penelitian Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia membahas perkembangan konflik Papua dari perspektif historis dan politik. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan keamanan telah lama digunakan dalam penanganan konflik, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan. Para penulis menekankan pentingnya pendekatan yang lebih demokratis dan mampu mengakomodasi aspirasi berbagai pihak. Penelitian ini menjadi rujukan untuk memahami dinamika kebijakan keamanan Indonesia di Papua. Adapun perbedaannya terletak pada fokus

*Princess Ngozi Chika
E-mail addresses: 2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id



penelitian ini yang secara khusus mengkaji hubungan antara posisi strategis Papua, kepentingan nasional, dan strategi geopolitik Indonesia pada periode 2025–2026.

Keempat, Agustus et al. (2025) dalam penelitian Strengthening the Papua Steering Committee Strategy Reducing Instability for Accelerated Development in Papua, Indonesia membahas pentingnya penguatan strategi kelembagaan pembangunan untuk mengurangi ketidakstabilan di Papua. Kajian tersebut menempatkan pembangunan dan penanganan akar konflik sebagai bagian penting dari upaya menciptakan stabilitas. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa pembangunan daerah memiliki keterkaitan dengan kondisi keamanan. Namun, fokus kajian tersebut lebih diarahkan pada strategi kelembagaan pembangunan, sedangkan penelitian ini menganalisis persoalan tersebut dalam kerangka geopolitik dan strategi bertahan Indonesia.

Kelima, Lubis (2024) melalui penelitian Conflict Resolution Strategy in Papua through Concurrent Military and Non-Military Operations Executed by the Indonesian National Armed Forces (TNI) membahas strategi penyelesaian konflik melalui pelaksanaan operasi militer dan nonmiliter. Penelitian tersebut relevan untuk memahami peran instrumen pertahanan dan keamanan dalam kebijakan pemerintah di Papua, termasuk pentingnya memperhatikan aspek hukum dalam pelaksanaan operasi. Perbedaannya, kajian Lubis lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan pelaksanaan operasi, sedangkan penelitian ini melihat kebijakan keamanan sebagai bagian dari strategi geopolitik Indonesia dalam mempertahankan stabilitas dan integritas teritorial.

Berdasarkan kelima penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa konflik Papua telah dikaji melalui berbagai perspektif, tetapi masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Wangge (2023) berfokus pada sekuritisasi dan keterlibatan masyarakat adat, Christian (2026) membahas kedaulatan dan penguatan kekuasaan negara, Nurhidayat et al. (2023) mengkaji politisasi konflik dan pendekatan keamanan, Agustus et al. (2025) menyoroti hubungan pembangunan dengan stabilitas, sedangkan Lubis (2024) menekankan strategi operasi militer dan nonmiliter.

Penelitian ini menempatkan diri pada kajian geopolitik Indonesia dengan memusatkan perhatian pada konflik bersenjata di Papua selama periode 2025–2026. Fokus tersebut digunakan untuk menganalisisbagaimana posisi strategis Papua, kepentingan nasional, kebijakan keamanan, dan pembangunan berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan mempertahankan kedaulatan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian terdahulu melalui analisis terhadap strategi geopolitik Indonesia dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua pada periode yang ditentukan. Analisis tersebut tidak hanya diarahkan pada bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah, tetapi juga pada hubungan antara kondisi geografis, kepentingan nasional, dan tantangan dalam mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan

1. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi kasus. Pemilihan pendekatan tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua pada periode 2025–2026. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian tidak berorientasi pada pengujian hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan pada pemahaman terhadap fenomena, kebijakan, dinamika konflik, serta respons negara dalam

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

konteks tertentu. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dan lebih menekankan pemaknaan terhadap suatu fenomena daripada generalisasi.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan perkembangan konflik bersenjata di Papua serta berbagai bentuk respons pemerintah Indonesia selama periode penelitian. Deskripsi tersebut kemudian dianalisis dengan menghubungkannya pada aspek keamanan, politik, pembangunan, dan geopolitik. Pemilihan metode ini juga mempertimbangkan penelitian terdahulu yang banyak menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan konflik Papua melalui perspektif sekuritisasi, kedaulatan, kebijakan keamanan, pembangunan, dan peran aparat negara. Dengan demikian, penelitian ini melanjutkan kajian terdahulu dengan memberikan penekanan yang lebih spesifik pada dimensi geopolitik Indonesia dalam menghadapi konflik bersenjata pada periode 2025–2026. Metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada fenomena tertentu, yaitu konflik bersenjata di Papua selama periode 2025–2026. Studi kasus memungkinkan penelitian dilakukan secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, keamanan, dan geografis yang memengaruhi perkembangan konflik. Kasus tersebut kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana Indonesia menggunakan berbagai kebijakan dan strategi dalam mempertahankan stabilitas keamanan serta keutuhan wilayah Papua.

Dalam penelitian ini, konflik bersenjata di Papua tidak hanya dipahami sebagai persoalan keamanan dalam negeri, tetapi juga sebagai persoalan yang memiliki dimensi geopolitik. Hal tersebut berkaitan dengan posisi geografis Papua yang berada di kawasan timur Indonesia dan berdekatan dengan wilayah Pasifik, serta adanya perhatian dari aktor regional dan internasional terhadap dinamika Papua. Oleh karena itu, penelitian memperhatikan hubungan antara kondisi geografis Papua, kepentingan nasional Indonesia, integritas teritorial, kebijakan keamanan, pembangunan, serta perkembangan lingkungan keamanan regional. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan konflik dan kebijakan Papua. Sumber data meliputi laporan pemerintah, dokumen kebijakan, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), data Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, pemberitaan media nasional dan internasional digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan konflik dan respons pemerintah selama periode 2025–2026.

Pemilihan sumber tersebut disesuaikan dengan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Wangge (2023), misalnya, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis sekuritisasi konflik politik di Papua dan keterlibatan masyarakat adat dalam proses tersebut. Christian (2026) juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan konsep kedaulatan, sekuritisasi, dan strong-state theory untuk melihat hubungan antara kekuasaan negara dan konflik Papua . Sementara itu, penelitian Nurhidayat dan kawan-kawan (2023) memberikan gambaran historis mengenai politisasi konflik Papua dan dominasi pendekatan keamanan. Penelitian mengenai Papua Steering Committee tahun 2025 memberikan tambahan perspektif mengenai hubungan antara stabilitas keamanan dan pembangunan,20 sedangkan penelitian Lubis (2024) digunakan untuk memahami aspek hukum dan peran operasi militer serta nonmiliter dalam penanganan konflik Papua.

*Princess Ngozi Chika
E-mail addresses: 2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dengan mempertimbangkan temuan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk respons keamanan pemerintah, tetapi juga menganalisisnya melalui perspektif geopolitik. Fokus tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kepentingan nasional, posisi strategis wilayah Papua, kebijakan pemerintah, serta dinamika keamanan regional saling berkaitan dalam upaya menjaga stabilitas keamanan. Sebagai data pendukung, penelitian juga menggunakan data kuantitatif secara deskriptif untuk menunjukkan perkembangan situasi konflik selama periode penelitian. Berdasarkan data Komnas HAM yang disampaikan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, sepanjang tahun 2025 tercatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, sedangkan hingga April 2026 tercatat 26 peristiwa. Data tersebut tidak digunakan untuk melakukan pengujian statistik, tetapi digunakan sebagai gambaran empiris mengenai perkembangan kondisi keamanan Papua. Data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan informasi mengenai kebijakan keamanan, pembangunan, serta respons pemerintah terhadap konflik.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua selama periode 2025–2026. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kondisi geografis Papua, kepentingan nasional Indonesia, dinamika konflik bersenjata, dan kebijakan pemerintah dalam mempertahankan stabilitas keamanan serta keutuhan wilayah Indonesia.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik bersenjata di Papua pada periode 2025–2026 menunjukkan bahwa upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempertahankan integritas teritorial masih menghadapi tantangan yang kompleks. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kelompok bersenjata, tetapi juga melibatkan faktor historis, politik, sosial, ekonomi, dan geografis. Dalam perspektif geopolitik, Papua memiliki posisi strategis karena terletak di bagian timur Indonesia, berbatasan langsung dengan Papua Nugini, serta memiliki keterkaitan dengan dinamika keamanan kawasan Pasifik. Oleh karena itu, stabilitas keamanan Papua menjadi bagian penting dari kepentingan nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang disampaikan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia pada 10 Mei 2026, tercatat sebanyak 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang tahun 2025. Peristiwa tersebut mengakibatkan 119 orang meninggal dunia dan 43 orang mengalami luka-luka. Sementara itu, berdasarkan perkembangan data Komnas HAM hingga semester pertama 2026, tercatat 42 peristiwa konflik bersenjata yang mengakibatkan 59 orang meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah korban meninggal pada semester pertama 2026, sebanyak 43 orang merupakan masyarakat sipil, delapan orang anggota TNI-Polri, dan delapan orang dari kelompok sipil bersenjata. Data tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat sipil menjadi kelompok yang paling terdampak dalam dinamika konflik bersenjata di Papua (Kementerian HAM, 2026; ANTARA, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan di Papua belum dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan kapasitas aparat negara. Tingginya jumlah korban jiwa, khususnya masyarakat sipil, memperlihatkan bahwa konflik telah menimbulkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain korban jiwa, konflik juga menyebabkan pengungsian

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



internal dan terganggunya akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan tidak cukup diukur melalui kemampuan pemerintah dalam mengendalikan wilayah, tetapi juga melalui kemampuan negara dalam memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan masyarakat. Gambaran tersebut diperkuat oleh laporan Human Rights Monitor (2026) yang mendokumentasikan 141 bentrokan dan serangan bersenjata sepanjang 2025. Laporan tersebut mencatat bahwa konflik tersebar di 16 kabupaten di wilayah Papua, dengan intensitas tertinggi terjadi di Kabupaten Yahukimo sebanyak 35 bentrokan dan Intan Jaya sebanyak 31 bentrokan. Kabupaten Puncak juga mencatat 23 bentrokan, sedangkan Pegunungan Bintang mencatat 10 bentrokan. Selain itu, laporan tersebut mencatat 73 warga sipil meninggal dunia akibat konflik bersenjata selama 2025, dengan 31 kematian dikaitkan dengan tindakan aparat keamanan dan 42 kematian dikaitkan dengan serangan kelompok TPNPB. Human Rights Monitor juga memperkirakan lebih dari 105.878 orang mengalami pengungsian internal hingga awal Januari 2026. Data ini dihimpun melalui jaringan gereja lokal, pembela HAM, dan pemberitaan media sehingga memiliki metode pendataan yang berbeda dengan Komnas HAM. Oleh sebab itu, kedua sumber tersebut digunakan sebagai gambaran dari perspektif pendataan yang berbeda, bukan sebagai angka yang dapat digabungkan secara langsung (Human Rights Monitor, 2026).

Tingginya intensitas konflik di Yahukimo, Intan Jaya, dan Puncak memperlihatkan bahwa persoalan keamanan tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi di sejumlah wilayah yang memiliki karakteristik geografis tertentu. Kondisi pegunungan, hutan lebat, keterbatasan akses transportasi, serta jarak antarpemukiman menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, kondisi geografis Papua bukan sekadar latar belakang terjadinya konflik, melainkan salah satu faktor strategis yang menentukan efektivitas kebijakan negara. Pemerintah membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat agar pelaksanaan kebijakan keamanan tidak menimbulkan persoalan baru. Selain persoalan geografis, dampak konflik terhadap masyarakat memperlihatkan adanya hubungan antara keamanan dan keberlangsungan pembangunan. Human Rights Monitor (2026) memperkirakan bahwa jumlah pengungsi internal di Papua telah melampaui 105.878 orang hingga awal Januari 2026. Pengungsian tersebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Nduga, Puncak, Intan Jaya, Yahukimo, dan Mimika. Dampaknya tidak hanya berupa kehilangan tempat tinggal, tetapi juga terganggunya pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Laporan tersebut juga mencatat bahwa sebagian masyarakat yang mengungsi telah meninggalkan tempat tinggalnya selama bertahun-tahun akibat konflik yang berulang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik bersenjata memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia di Papua (Human Rights Monitor, 2026).

Dalam konteks geopolitik, situasi tersebut memperlihatkan bahwa penguasaan dan pengamanan wilayah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan penduduknya. Konsep Wawasan Nusantara memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan konsep tersebut, Papua memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan wilayah Indonesia lainnya dalam menjaga integritas nasional. Namun, implementasi Wawasan Nusantara tidak cukup diwujudkan melalui kehadiran aparat negara dan pengendalian wilayah. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh akses pembangunan, pelayanan publik, dan perlindungan hak-hak dasar secara adil. Strategi pemerintah Indonesia dalam

*Princess Ngozi Chika
E-mail addresses: 2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id



menghadapi konflik Papua memperlihatkan adanya penekanan terhadap penguatan aspek keamanan dan pertahanan. Kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya negara dalam mempertahankan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional di wilayah yang memiliki posisi strategis. Dalam perspektif geopolitik, keberadaan aparat keamanan merupakan salah satu instrumen negara untuk menjaga stabilitas wilayah dan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, penggunaan pendekatan keamanan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat sipil. Ketika peningkatan kehadiran aparat tidak diikuti dengan perlindungan yang memadai dan penyelesaian persoalan sosial-politik, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Selain pendekatan keamanan, pemerintah Indonesia juga memiliki instrumen kebijakan pembangunan melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menegaskan pentingnya perlindungan hak dasar Orang Asli Papua, percepatan pembangunan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara normatif, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan Papua tidak hanya diarahkan pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup pembangunan dan perlindungan masyarakat lokal. Akan tetapi, keberadaan kebijakan tersebut perlu diikuti dengan implementasi yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya dapat dilihat dari pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua (Republik Indonesia, 2021). Jika dianalisis menggunakan teori strategi bertahan, kebijakan Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan eksistensi, kedaulatan, dan integritas teritorial negara. Kenneth Waltz (1979) menjelaskan bahwa negara dalam sistem internasional yang bersifat anarki berupaya mempertahankan keamanan melalui mekanisme *self-help*. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas internal, termasuk pertahanan, ekonomi, dan institusi negara. Dalam konteks Papua, penguatan kapasitas keamanan dan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari upaya internal pemerintah untuk mempertahankan stabilitas wilayah.

Meskipun demikian, teori strategi bertahan tidak hanya menekankan kemampuan militer suatu negara. Stephen Walt (1987) menjelaskan bahwa respons negara terhadap ancaman juga dipengaruhi oleh persepsi mengenai tingkat ancaman yang dihadapi. Dalam konteks Papua, posisi geografis yang berbatasan dengan Papua Nugini dan berada di kawasan Pasifik memberikan dimensi strategis terhadap kebijakan keamanan Indonesia. Namun, ancaman terhadap stabilitas wilayah tidak hanya bersumber dari aktivitas kelompok bersenjata, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan, lemahnya kepercayaan masyarakat, serta persoalan perlindungan hak asasi manusia. Pemikiran tersebut berkaitan dengan konsep *security dilemma*, yaitu kondisi ketika tindakan suatu pihak yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan justru dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak lain. Dalam konteks konflik Papua, penguatan kehadiran aparat yang bertujuan menjaga keamanan dapat menimbulkan persepsi negatif apabila masyarakat mengalami tindakan kekerasan, pembatasan aktivitas, atau kehilangan akses terhadap tempat tinggal dan pelayanan publik. Situasi tersebut dapat memperbesar jarak antara negara dan masyarakat sehingga tujuan menciptakan stabilitas justru semakin sulit dicapai. Oleh karena itu, strategi bertahan Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pertahanan negara dan rasa aman masyarakat yang tinggal di wilayah konflik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 6, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Temuan penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Wangge (2023) berjudul *Securitization of a Political Conflict in Southeast Asia: Disengaging the Indigenous Audience in West Papua*. Wangge menjelaskan bahwa pendekatan sekuritisasi pemerintah Indonesia belum mampu menyelesaikan konflik secara berkelanjutan karena kurang melibatkan masyarakat adat Papua dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan keamanan. Penelitian tersebut menekankan bahwa masyarakat yang terdampak kebijakan perlu dilibatkan agar kebijakan keamanan memperoleh legitimasi. Temuan penelitian Wangge relevan dengan kondisi 2025–2026, terutama ketika data konflik masih menunjukkan tingginya korban masyarakat sipil dan pengungsian internal. Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan keamanan perlu disertai dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses penyelesaian konflik (Wangge, 2023).

Penelitian Christian (2026) berjudul *Totalizing Sovereignty: Securitization and the Paradox of Strong State Power in Papua* juga memberikan perspektif penting dalam memahami hubungan antara kekuasaan negara dan konflik Papua. Christian menjelaskan bahwa penguatan kekuasaan negara melalui sekuritisasi dan pembangunan yang bersifat top-down berpotensi memperdalam konflik apabila tidak memberikan ruang yang memadai bagi aspirasi masyarakat lokal. Penelitian tersebut memperkenalkan konsep *totalization logic* untuk menjelaskan pendekatan negara yang terlalu terpusat dalam mengelola persoalan Papua. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, temuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan kedaulatan tidak selalu berbanding lurus dengan terciptanya stabilitas keamanan. Kekuatan negara perlu disertai dengan legitimasi, partisipasi masyarakat, dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk lokal (Christian, 2026).

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu tersebut terletak pada fokus analisis dan periode kajian. Wangge (2023) lebih menekankan persoalan sekuritisasi dan keterlibatan masyarakat adat, sedangkan Christian (2026) membahas paradoks penguatan kekuasaan negara melalui perspektif kedaulatan dan sekuritisasi. Sementara itu, penelitian ini menghubungkan dinamika konflik bersenjata 2025–2026 dengan kepentingan geopolitik Indonesia dalam mempertahankan integritas teritorial dan stabilitas kawasan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memperluas pembahasan mengenai konflik Papua melalui penggabungan perspektif geopolitik dan teori strategi bertahan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, strategi geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kepentingan kedaulatan negara dengan perlindungan masyarakat. Data Komnas HAM menunjukkan bahwa konflik masih menimbulkan korban jiwa dan luka-luka hingga semester pertama 2026. Sementara itu, laporan Human Rights Monitor memperlihatkan adanya peningkatan bentrokan bersenjata, korban sipil, serta pengungsian internal sepanjang 2025. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas keamanan belum dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, strategi geopolitik Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih menyeluruh dengan mengintegrasikan aspek pertahanan, pembangunan, diplomasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan di wilayah terdampak konflik, dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi. Selain itu, pelibatan masyarakat adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyelesaian konflik menjadi penting untuk membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat.

*Princess Ngozi Chika
E-mail addresses: 2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id



Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori strategi bertahan perlu dipahami tidak hanya melalui penguatan kapasitas pertahanan, tetapi juga melalui kemampuan negara mempertahankan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Sementara itu, perspektif geopolitik memperlihatkan bahwa stabilitas wilayah tidak hanya ditentukan oleh penguasaan ruang geografis, tetapi juga oleh keberhasilan pemerintah dalam mengelola kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat lokal. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan kedua perspektif tersebut untuk menjelaskan bahwa kedaulatan dan stabilitas keamanan merupakan dua kepentingan yang harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, strategi geopolitik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua pada periode 2025–2026 belum dapat dinilai berhasil secara menyeluruh apabila masih terdapat tingginya kekerasan, korban masyarakat sipil, dan pengungsian berkepanjangan. Keberhasilan strategi tersebut perlu diukur melalui terciptanya keamanan yang berkelanjutan, terjaminnya perlindungan masyarakat, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Pendekatan yang menggabungkan kepentingan pertahanan nasional dengan pembangunan yang inklusif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Papua.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa strategi geopolitik Indonesia di Papua selama 2025–2026 sangat dipengaruhi oleh letak Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan berada di kawasan Pasifik. Karena posisinya itu, kebijakan pemerintah lebih banyak diarahkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Dalam menghadapi konflik bersenjata, pemerintah masih lebih mengandalkan pendekatan keamanan, sedangkan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat Papua belum berjalan seimbang. Artinya, stabilitas yang bertahan lama tidak bisa hanya dilihat dari berhasil atau tidaknya negara menguasai wilayah. Strategi bertahan juga harus mencakup pembangunan, penegakan hukum, diplomasi, dan perlindungan warga sipil. Kontribusi penelitian ini ada pada penggabungan perspektif geopolitik dan strategi bertahan untuk membaca konflik Papua pada periode terbaru. Secara teori, hasil ini menunjukkan bahwa analisis geopolitik akan lebih lengkap kalau tidak berhenti pada soal kekuatan militer. Untuk kebijakan, keamanan, pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia sebaiknya dijalankan bersamaan. Penelitian ini juga punya keterbatasan karena hanya memakai data sekunder, sehingga belum mencakup pandangan langsung dari masyarakat dan pelaksana kebijakan. Bagi pemerintah, pendekatan keamanan di Papua sebaiknya dijalankan berbarengan dengan percepatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi di daerah konflik, serta dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat perlu diperluas supaya kebijakan lebih diterima. Bagi aparat keamanan, operasi di lapangan sebaiknya tetap berpegang pada aturan hukum dan prinsip hak asasi manusia agar kepercayaan warga bisa pulih. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini bisa dilengkapi dengan data primer lewat wawancara atau observasi lapangan, dan penelitian lanjutan juga bisa membahas hubungan Indonesia dengan Papua Nugini dan negara-negara Pasifik, atau membandingkan kebijakan di beberapa wilayah konflik seperti Intan Jaya, Yahukimo, dan Nduga.



4. DAFTAR PUSTAKA

ACAPS. (2026). *Indonesia: Protracted conflict in West Papua and humanitarian situation.* https://www.acaps.org/en/countries/indonesia

Agustus, F. S., Andoko, D., Muniasari, M., Savitri, C. M., Nurisnaeny, P. S., & Maya, H. B. (2025). Strengthening the Papua Steering Committee strategy: Reducing instability for accelerated development in Papua, Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open, 11,* 101413. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.1014

Auliya, T. (2026). Dinamika konflik Papua dan kesenjangan pembangunan antarwilayah: Analisis geopolitik dan geostrategi dalam kerangka ketahanan. *Maliki Interdisciplinary Journal,* 4(6), 669–675.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2025). *Statistik ketahanan sosial Provinsi Papua 2025*. BPS Provinsi Papua. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=JfJeCRCM4Z2p3eg3kgrKeExuL3Zkcjd6bTQxcUE0VElWeWZOVUhzRlZBU0k1UEQwN0NsRzlPV2d2dXBPU0hveU4rWFBRckQ5YjMwcENMSWRsQldWZHg4aU5sN2lNbUR0aU4zTEF0eDJjMFhSSXl6Qms3WkFYUExlR3hMTTNOT0g2SE0zaGovRUJ3VUhDMFpvRmFDODNndDNVelZBU3VRTXI2Qml2eGlEMkZteHBKRSs0RCtXY1hNRHJwZHpwaEVnVTF3cXQyTDN1NEYyS3c5Y3kvMXhhOXQ5VHlxcFlqMXpUYVkzNmpZb0RqVjYxbUVNVGFWUkpZVytFa3A1aUorYlNGTmpHanFYVlhSbUxnOFVjb2NxVGh4VnVXVDVkSHozZnloNjlRPT0=

Christian, J. (2026). Totalizing sovereignty: Securitization and the paradox of strong state power in Papua. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional,* 18(1), 15–35. https://doi.org/10.19166/verity.v18i35.10877

Clausewitz, C. von. (1976). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press.

Galula, D. (1964). *Counterinsurgency warfare: Theory and practice.* Praeger.

Human Rights Monitor. (2026a). *Annual report 2025: Human rights and conflict in West Papua.* https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2025-human-rights-and-conflict-in-west-papua/

Human Rights Monitor. (2026b). *Papua Monitor Q1 2026: No de-escalation as military operations drive new displacement.* https://humanrightsmonitor.org/reports/papua-monitor-q1-2026-no-de-escalation-as-military-operations-drive-new-displacement/

*Princess Ngozi Chika
E-mail addresses: 2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id



Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics,* 30(2), 167–214. https://doi.org/10.2307/2009958

Kaelan, & Zubaidi, A. (2010). *Pendidikan kewarganegaraan.* Paradigma.

Indonesia. (2026, 10 Mei). *Tanggapi penyelesaian konflik Papua, Menteri HAM sampaikan butuh keputusan nasional dan pendekatan menyeluruh.* https://origin.kemenham.go.id/publikasi/tanggapi-penyelesaian-konflik-papua-menteri-ham-sampaikan-butuh-keputusan-nasional-dan-pendekatan-menyeluruh

Kompas. (2026, 28 Oktober). *Anggota Wantimpres Bamsoet: Perdamaian Papua butuh keadilan dan kesejahteraan.* https://www.kompas.id/artikel/anggota-wantimpres-bamsoet-perdamaian-papua-butuh-keadilan-dan-kesejahteraan

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2013). *Wawasan Nusantara.*

Lubis, A. F. (2024). Conflict resolution strategy in Papua through concurrent military and nonmilitary operations executed by the Indonesian National Armed Forces (TNI). *International Journal of Law.* https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i1.34

Lumbung Pare. (2025). *Analisis konflik struktural dalam isu kekerasan bersenjata di Papua.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa. https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/download/1477/1184/10761

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Nurhidayat, Kusuma, Uksan, A., & Widodo, P. (2023). Menilik politisasi konflik Papua: Dilema isu keamanan Indonesia. https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4759

Nursidik. (2023). *Konflik bersenjata di Provinsi Papua. Repository UBK Karawang.* http://repository.ubpkarawang.ac.id/id/eprint/1220/6/6.%20Bab%20III_HK_200032_16416274201125_Nursidik.pdf

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.* https://peraturan.bpk.go.id/Details/172403/uu-no-2-tahun-2021

Taylor, dkk. (2026). The diverging patterns and conditions for conflict resolution: A comparative analysis of Indonesia and the Philippines. *Journal of International Relations and Development.* https://doi.org/10.1080/14799855.2025.2580680

Walt, S. M. (1987). *The origins of alliances.* Cornell University Press.

Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics.* Addison-Wesley.



Wangge, H. R. (2023). Securitization of a political conflict in Southeast Asia: Disengaging the indigenous audience in West Papua. *Asian Security,* 19(3), 207–227. https://doi.org/10.1080/14799855.2023.2225419

Wijanarko, T. (2025). Integrated policy strategies for resolving separatism in Papua to achieve national security and stability. *Proceedings of the National Conference on Political, Social, and Humanities Research.*

*Princess Ngozi Chika
E-mail addresses: 2310413104@mahasiswa.upnvj.ac.id